

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

Weli Arjuna Wiwaha

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar
weli.abushobah@gmail.com

Abstrak

Kekerasan atas nama agama, suku, etnis, dan lain sebagainya sering menjadi suguhan biasa di negeri Indonesia. Memang dengan karakter negaranya yang berpulau-pulau menjadikannya rentan akan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Agama Islam sebagai agama dengan pemeluk terbesar diharapkan mampu menjadi penganyom beberapa pemeluk agama dan perbedaan suku yang ada. Telah jelas pada masa Rasulullah, Islam sebagai agama yang membawa rahmat, melalui piagam madinah, hak-hak pemeluk agama dan setiap orang dilindungi oleh Islam. Oleh karena itu, dengan beranegaragam penduduk Indonesia, diperlukan sebuah pemahaman tentang kemultikulturalan, agar tidak terjadi perselisihan antar mereka yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Untuk dapat memberikan pemahaman tentang kemultikulturalan tersebut, melalui pendidikan adalah alternatif yang paling efektif, baik formal maupun non formal. Karena dengan itu, mulai dari generasi yang paling kecil sampai generasi tua bisa tercover, tidak menitikberatkan pada satu generasi saja.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Multikultural.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi multi-kultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari dinamika kehidupan masyarakat yang beragam, baik dalam aspek keagamaan, suku bangsa, bahasa maupun budaya. Keragaman yang ada, sesungguhnya dapat menjadi salah satu potensi besar bagi kemajuan bangsa. Namun di lain pihak, juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik.¹ Umat muslim sebagai pemeluk agama yang mayoritas, harus berperan aktif dalam mengelola dimensi keragaman bangsa ini. Pendidikan Islam sebagai salah satu instrumen penting peradaban umat, perlu dioptimalkan sebaik mungkin untuk menata dinamika keragaman agar dapat menjadi potensi kemajuan.

Sejatinya dalam beberapa dekade belakangan ini, gagasan yang berupaya mengakomodasi dan menata aspek keragaman melalui agenda pendidikan Islam cukup banyak dilakukan. Tidak sedikit pula ide-ide bermunculan terkait multikulturalisme yang teraktualisasi dalam wacana pendidikan Islam. Hanya saja jika dilihat dari proses pengembangan serta aspek implementasinya, masih belum berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan pendidikan Islam multikultural masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Sebagai wacana yang relatif baru, hal ini tentu saja bisa dimaklumi. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan berbagai persoalan yang ada di lapangan, kebutuhan akan implementasi yang tepat dan terarah, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

Persoalan-persoalan yang muncul setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni: *Pertama*, aspek kuantitatif, pendidikan Is-

1 Kerusuhan Sampit, konflik horizontal di Maluku (Ambon), kerusuhan Poso di Sulawesi serta gejolak sosial yang tiada henti di Papua, merupakan sebagian kecil dari konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia. Yang terbaru adalah peristiwa Tolikara Papua.

lam multikultural masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum berpengaruh luas terhadap masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Walaupun di tingkat perguruan tinggi (khususnya di PTAI) wacana multikulturalisme sudah cukup mendapat tempat, namun di tingkat sekolah (menengah) khususnya yang berada di daerah – sekolah umum, madrasah maupun pesantren –, spirit dan nilai-nilai multikulturalisme belum tersosialisasi secara luas. Begitupun dengan pemahaman masyarakat terkait pentingnya multikulturalisme, secara umum dapat dikatakan masih sangat sempit.

Kedua, aspek kualitatif, baik dari sisi konsep maupun implementasinya masih banyak bagian yang perlu dibenahi. Secara konsep, pendidikan Islam multikultural kurang tersistematisasi dengan baik, terutama untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya referensi hasil pemikiran yang secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk implementasi pendidikan Islam multikultural, sehingga berdampak pada usaha-usaha praktis yang akan dilakukan. Begitupula dalam proses pembelajaran –terutama di tingkat sekolah menengah–, multikulturalisme belum terintegrasi secara jelas di dalam kurikulum, baik sebagai materi tersendiri, pokok bahasan atau materi sisipan. Kondisi ini ditambah pula dengan persoalan tenaga pendidik yang sebagian besar belum memahami dengan baik mengenai konsep multikulturalisme yang berimplikasi pada proses internalisasi dalam pembelajaran.

Mencermati fenomena yang demikian, maka upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural sangat perlu dilakukan untuk lebih memperluas dan mengefektifkan pelaksanaan pendidikan Islam yang mengakomodasi segala bentuk dinamika keragaman dan perbedaan. Adapun uraian dalam tulisan ini, merupakan salah satu bentuk tawaran dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam multikultural, yang fokus pada beberapa aspek kajian,

yaitu: (1) Pengertian atau hakikat dari pendidikan Islam multikultural; (2) Landasan pengembangan pendidikan Islam multikultural, yang terdiri dari landasan preskriptif dan empirik; (3) Upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif; (4) Analisis kritis yang terkait dengan peluang, tantangan, serta rekomendasi yang dapat diberikan dalam proses pengembangan pendidikan Islam multikultural.

Landasan Teori

1. Pengertian dan Hakikat Pendidikan Islam Multikultural

Secara sederhana, multikultural dapat berarti keragaman budaya². Istilah multikultural dibentuk dari kata *multi* yang berarti *plural*; banyak; atau beragam, dan *kultur* yang berarti budaya.³ Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya.⁴ Dengan kata lain, kultur merupakan sifat yang khas bagi setiap individu (*person*) atau suatu kelompok (*comunitie*) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan lainnya. Semakin banyak komunitas yang muncul, maka semakin beragam masing-masing kultur yang akan dibawa.

Aspek keragaman yang menjadi esensi dari konsep multikultural dan kemudian berkembang menjadi gerakan yang disebut dengan multikulturalisme, merupakan gerakan yang bukan hanya menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan yang ada, tetapi juga bagaimana keragaman atau perbedaan yang ada dapat diperlakukan sama sebagaimana harusnya. Dalam kaitan ini, ada tiga hal pokok yang menjadi aspek mendasar dari multikultural-

2 Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), 2.

3 Abdullah M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religius* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah), 2005, 13.

4 M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural (Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan)* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 9.

isme, yakni: *Pertama*, sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. *Kedua*, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan hal yang *Ketiga*, yaitu pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua elemen sosial-budaya, termasuk juga negara.

Dengan demikian, aspek pokok yang sangat ditekankan dalam gerakan multikulturalisme adalah kesediaan menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sama dan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harkat dan martabat manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan entitas budayanya masing-masing (yang bersifat dinamis dan khas), merupakan dimensi yang sangat penting diperhatikan dalam gerakan multikulturalisme.⁵

Berangkat dari konsep yang demikian, maka sudah seharusnya nilai-nilai multikulturalisme dapat terintegrasi secara jelas dalam agenda pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam, dalam pengertian yang bersifat normatif merupakan suatu proses spiritual, akhlak, intelektual dan sosial untuk membimbing manusia sekaligus memberikan kepada mereka nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan ideal dalam kehidupan, dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁶

5 Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat dengan karakter beragam, baik dalam aspek keagamaan, ras, bahasa, maupun budaya yang berbeda. Istilah tersebut yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga istilah ini tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*), sedangkan keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen dan bahkan tak dapat disamakan. Apabila pluralitas sekadar menunjukkan adanya kemajemukan, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Lihat Charles Taylor, "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman, *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), 18

6 Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), 62.

Dalam pengertian yang lebih praktis dan bersifat aplikatif, pendidikan Islam setidaknya memiliki dua substansi, *pertama*, pendidikan Islam adalah aktivitas pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan dengan niat dan tujuan untuk mengejawantah ajaran dan nilai-nilai Islam. *Kedua*, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan dijiwai oleh ajaran serta nilai-nilai Islam.⁷ Untuk itu, unsur apapun yang akan diintegrasikan atau dikembangkan dalam setiap dimensi pendidikan Islam, harus diarahkan pada konsep dan bentuk-bentuk pendidikan Islam, baik yang bersifat normatif maupun praktis (sistem dan aktivitas).

Semangat dan nilai-nilai multikulturalisme yang terintegrasi dalam sistem dan aktivitas pendidikan Islam, merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi dan menata dinamika keragaman, perbedaan dan kemanusiaan melalui aktivitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Alquran dan as-Sunnah.

7 Untuk yang *Pertama*, dalam prakteknya di Indonesia terdiri atas beberapa jenis, di antaranya (1) Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah; (2) PAUD/RA, BA, TA, Madrasah dan perguruan tinggi Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama; (3) PAUD/RA, BA, TA, Madrasah dan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan yayasan atau organisasi Islam; (4) Pelajaran agama Islam di sekolah/madrasah/perguruan tinggi; dan (5) pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah serta forum-forum kajian atau majelis keislaman. Adapun yang *Kedua* mencakup: (1) pendidik/guru/dosen, kepala madrasah/sekolah atau pimpinan perguruan tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikan dengan dilandasi semangat ajaran dan nilai-nilai Islam; (2) komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti tujuan, materi/bahan ajar, alat/media/sumber belajar, metode, evaluasi, lingkungan/konteks, manajemen, dan lain-lain yang didasari nilai-nilai Islam. Lihat Muhaimin, et. al., *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2009), 3-4

2. Landasan Religius Pendidikan Islam Multikultural

Keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Alquran sebagai representasi pesan-pesan Allah untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. al-Hujurat [49]: 13: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁸

Melalui ayat ini Allah swt menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling *taffahum*, *ta’awun*, dan *tabayyun* sesama mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal.⁹ Kata *syu’ub* yang terdapat dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata *sy’aba* yang berarti golongan atau cabang, sedangkan kata *qaba’il* merupakan bentuk jamak dari kata *qabilah* yang berarti sekumpulan orang yang bertemu yang satu sama lainnya bisa saling menerima. Kata *qaba’il* selalu menunjuk pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadapan. Oleh karena itu, manusia sejak diciptakan walaupun dari

8 Lihat QS. al-Hujurat [49]: 13 dan lihat juga beberapa ayat lain yang termuat di dalamnya nilai-nilai tentang pengakuan terhadap adanya keragaman atau perbedaan, di antaranya: QS. al-Baqarah [2]: 285; Ali-Imran [3]: 3, 4, 84, 64-68; al-Maidah [5]: 48; al-Hajj [22]: 67-69; al-Hadid [57]: 27.

9 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 320.

rahim yang berbeda-beda tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdependensi (sosial) yang saling bergantung satu sama lainnya.¹⁰

Alquran surah Al-Hujurat [49]: 13 secara konteks turun sebagai respon atas pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit serta kedudukan, dan menyebabkan mereka memiliki pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain,¹¹ merupakan salah satu persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sikap memandang rendah orang lain, primordialisme (*ashabiyah*), tidak siap berbeda dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, adalah di antara sikap-sikap yang mengindikasikan masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik secara konsep maupun praktek.

Sebagai sebuah konsep, kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat post-modernisme, yang berangkat dari pemikiran tentang ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar dan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi atau menjeneralisasi. Selain menolak pemikiran yang totaliter, filsafat post-modernisme juga menghaluskan sensitifitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi terhadap realitas yang terukur. Post-modernisme menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (*truth claim*). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah ber-

10 Waryono Abdul Gafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 11-12.

11 Dalam satu riwayat dikemukakan, ketika *fathu Mekah* Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata "apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?", maka berkatalah yang lainnya "sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya." Kemudian ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia adalah yang bertaqwa (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hattim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah). Lihat lebih lengkap dalam K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alquran* (Bandung: CV. Diponegoro, 2001), h. 518.

beda (*all is difference*).¹²

Filsafat post-modernisme yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat modernisme,¹³ melahirkan beberapa bentuk pemikiran yang sangat mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang menonjol dari pemikiran post-modernisme adalah lahirnya pengakuan akan pluralitas kehidupan. Bagi post-modernisme, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran pluralisme¹⁴ dan multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional.

Pengokohan multikulturalisme yang berangkat dari pemikiran filosofis di atas, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Landasan epistemologi yang telah dibangun dengan cukup jelas oleh aliran filsafat post-modernisme dalam usaha mengakomodasi fakta keragaman maupun perbedaan, sesungguhnya dapat menjadi tambahan referensi yang ilmiah untuk memformulasi pendidikan Islam multikultural secara lebih baik. Tentu dalam proses ini diperlukan sikap adaptif-kritis agar konsep-konsep tersebut tetap sejalan dengan spirit dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

12 Lihat Ali Maksum, et.al (ed.), *Pendidikan ...*, h. 292 dan Rizal Muntasyir, dkk, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 190.

13 Walaupun post-modernisme berarti kelanjutan modernisme, namun kelanjutan yang dimaksud lebih bersifat kritis. Bahkan dalam banyak aspek, post-modernisme merupakan lawan dari modernisme yang lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Post-modernisme menggugat kemapanan modernisme yang lebih mengagungkan rasionalitas dan telah melahirkan dunia yang merendahkan martabat manusia, sehingga melahirkan budaya kekuatan bagi yang berkuasa dan praktek kejahatan moral yang kian menjadi-jadi. Filsafat post-modernisme berusaha membalikkan fakta ini dengan mengedepankan seni filsafat yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Lihat Bambang Sugiharto, *Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: kanisius, 1996), h. 22-23.

14 Jean Farncois Lyotard, *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenal Pengetahuan*, terj. D. Dian Ellyati (Surabaya: Selasar Publishing, 2009), h. 80.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan.¹⁵ Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar Negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, maka pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara legal formal perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (*values*) serta pengakuan terhadap aspek keragaman. Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikap keragaman dengan perlakuan yang berlandaskan pada asas keadilan.

3. Landasan Empirik Pendidikan Islam Multikultural

Secara historis, gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 1970-an, disusul kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Di antara faktor yang melatarbelakangi kemunculan multikulturalisme di negara-negara tersebut adalah menyangkut persoalan rasisme dan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas,¹⁶ terutama yang ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari Afrika (negro).

Setelah beberapa dekade, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting, yaitu: *Pertama*, multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan

15 Secara tegas berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Lihat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 5.

16 H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002), 83.

budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. Kedua, adalah gelombang multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya,¹⁷ sehingga berimplikasi pada semakin kokohnya gerakan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari proses sejarah dengan perkembangan yang cepat, menunjukkan bahwa multikulturalisme sebagai gerakan yang konsen pada aspek-aspek pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, merupakan gerakan yang dinilai tepat untuk diposisikan sebagai alternatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan aspek keragaman. Respons positif tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari unsur kebutuhan manusia terhadap adanya suatu konsep yang dapat menata dan menghargai pluralitas dalam kehidupan secara lebih baik dan lebih berarti.

Adapun kebutuhan manusia terhadap gerakan multikulturalisme sesungguhnya tidak terlepas dari posisi manusia sebagai makhluk pribadi (individu) maupun makhluk sosial. Secara individu (pribadi), manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat atau karakter khas yang membedakannya dengan orang lain. Dalam perspektif psikologi, dikenal istilah kepribadian manusia, yakni sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain, integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang.¹⁸

Dengan kepribadian yang khas, maka sifat atau karakter yang

17 Gelombang ini mengalami beberapa tahapan, di antaranya: (1) kebutuhan atas pengakuan; (2) melibatkan berbagai disiplin akademik lain; (3) pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme; (4) gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli atau masyarakat adat (*indigenous people*); (5) post-kolonialisme; (6) globalisasi; (7) post-nasionalisme; (8) post-modernisme; serta (9) post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur keamanan dalam masyarakat. Lihat Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge: Harvard University Press, 2000), 125.

18 Kartini Kartono & Dali Gulo, *Kamus Psikologi* (Bandung: Pionir Jaya, 1987), 349.

dimiliki manusia pasti akan berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan yang ada bisa dalam banyak hal, seperti keinginan, perasaan, harapan, tujuan dan lain sebagainya. Di saat tertentu, kadang manusia merasa ingin dihargai, diakui dan diapresiasi, atau dalam hal-hal yang bersifat pribadi (*privacy*) selalu ingin dihormati. Di saat yang lain, kadang manusia juga ingin mendominasi, membenci, sakit hati, dan berkeinginan agar orang lain berpikir atau bersikap sama dengan dirinya. Sifat-sifat manusia yang kadang bertolak belakang ini sesungguhnya sangat manusiawi. Karena itu, ia perlu memahami, menghargai serta menghormati orang lain dan begitupun sebaliknya.

Secara sosial dan kultural, perkembangan kehidupan manusia yang saat ini berada pada fase peradaban global, sudah tentu tidak bisa terhindar dari unsur perbedaan atau keragaman (*diversitas*). Menurut Bikhu Parekh, perbedaan tersebut setidaknya bisa dikategorikan dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perspektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* (sejati) sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).¹⁹

Kompleksnya keragaman atau perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia, baik secara sosial maupun kultural merupakan hal yang wajar (alamiah). Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari proses interaksi dengan segala komponen yang ada disekitarnya, termasuk dengan sesamanya. Begitupun manusia sebagai makhluk yang berbudaya, maka bu-

19 *Ibid.*, 126-127.

daya-budaya yang lahir dari setiap individu maupun komunitas yang ada, selalu akan muncul dengan berbagai bentuknya. Untuk itu, berbagai konflik atau benturan terhadap fakta keragaman dan perbedaan yang ada perlu dikelola dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana yang terangkum dalam gerakan multikulturalisme.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, gerakan multikulturalisme yang tereduksi dalam pendidikan (Islam) menjadi sangat penting. Dengan jumlah ±13.000 pulau besar dan kecil serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri atas 300-an suku dengan hampir 200 bahasa yang digunakan,²⁰ sangat memerlukan konsep penataan yang baik agar tidak terjadi saling benturan. Begitupun dalam aspek keagamaan dan faham kepercayaan, di Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan dan aliran keyakinan lainnya. Fakta keragaman ini adalah aspek yang sangat sensitif apabila tidak dikelola dengan baik, terutama untuk kelompok masyarakat akar rumput (*grass root*), yang secara psikologis masih sangat mudah terpancing pada isu-isu yang bernuansa SARA. Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di masa lalu, diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terulang kembali.

Pembahasan

A. Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural

Istilah pengembangan dalam konteks pendidikan Islam multikultural, setidaknya memiliki dua makna, yakni pengembangan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam yang mengakomodasi semangat atau nilai-nilai multikulturalisme dapat menjadi lebih besar, merata dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan secara

²⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme ...*, 12.

umum, termasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Adapun secara kualitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam multikultural agar menjadi lebih baik, berkualitas dan lebih maju sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Sebagai sebuah perbandingan, pendidikan multikultural yang ber-kembang di negara-negara Barat, seperti di Amerika Serikat, merupakan proses pendidikan yang menekankan pada strategi pembelajaran dengan menjadikan latar belakang budaya siswa yang beraneka ragam sebagai dasar untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjang dan memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan, dan demokrasi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹ Pelaksanaan pendidikan multikultural yang berlangsung di Barat – terutama di Amerika – memposisikan aspek keragaman siswa sebagai faktor penting yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengembangan pendidikan multikultural secara lebih luas.

Adapun untuk konteks keindonesiaan, beberapa kajian yang terangkum dalam landasan preskriptif dan empirik di atas merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia. Upaya pengembangan tersebut sudah barang tentu harus menjadikan prinsip-prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sebagai landasan utama dalam proses pengembangannya.

Secara kuantitatif, usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural, di antaranya adalah, *pertama*, memperbanyak referensi atau bahan bacaan tentang pengembangan pendidikan Islam multikultural. Referensi atau bahan bacaan perlu disusun dengan memperhatikan sasaran pembaca. Bahan bacaan multikulturalisme yang ada saat ini lebih banyak ditujukan untuk kalangan akademis dengan

21 Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (New Jersey: Prentice Hill, 1998), 3.

bahasa atau kalimat yang akademis pula. Bagi pembaca di tingkat siswa atau masyarakat awam, bahan bacaan seperti ini tentu saja kurang bisa dimengerti, sehingga dapat menghambat proses sosialisasi atau internalisasi.

Kedua, memperbanyak kegiatan sosialisasi mengenai konsep dan urgensi pendidikan Islam multikultural, baik secara lisan maupun tertulis. Pelaksanaan sosialisasi hendaknya menjadi prioritas sebagaimana sosialisasi program lain yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemasangan spanduk, brosur, poster, baliho atau yang sejenis dengan menggunakan bahasa yang simpatik, tidak provokatif dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang terprogram, seminar, dan sebagainya. Sasarannya bisa lebih luas, tidak hanya dilingkungan pendidikan tetapi juga masyarakat secara umum.

Ketiga, Membuat forum-forum atau kelompok-kelompok yang konsern terhadap gerakan multikulturalisme, terutama di lembaga pendidikan Islam. Karena melalui forum, kelompok atau pusat kajian yang demikian, akan dapat lebih memperluas dan meningkatkan sosialisasi bahkan internalisasi semangat multikulturalisme dalam dunia pendidikan Islam.

Keempat, membangun kultur yang didasari semangat multikulturalisme, baik melalui lembaga pendidikan Islam maupun forum-forum pendidikan Islam di masyarakat. Secara institusional, hendaknya dapat membuat visi yang mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme secara jelas dan kemudian dari visi tersebut dapat dibangun semacam *corporate culture* (budaya organisasi) yang menjadikan visi tersebut sebagai arah kegiatan bagi seluruh komponen yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Adapun di masyarakat, membangun kultur dengan semangat multikulturalisme dapat dilakukan dengan memanfaatkan forum atau media pendidikan Islam yang ada di masyarakat itu sendiri, seperti

melalui kegiatan ceramah agama, khutbah jum'at, majelis ta'lim, acara-acara kemasyarakatan dan sebagainya.

Adapun secara kualitatif usaha-usaha yang perlu dilakukan adalah, *pertama*, membangun landasan teori (epistemologi) pendidikan Islam multikultural yang lebih mapan. Untuk saat ini, teori-teori tentang pendidikan multikultural masih banyak didominasi oleh pemikir-pemikir Barat. Teori-teori yang telah ditawarkan tersebut pada satu sisi memang banyak membantu terutama dalam hal konsep maupun praktek. Namun di sisi lain, konsep pendidikan multikulturalisme Barat yang berangkat dari filsafat post-modernisme, tidak semua aspek dapat dikonsumsi sebagai referensi. Dengan kata lain, diperlukan sikap kritis dan usaha penguatan konsep yang berangkat dari sumber-sumber Islam itu sendiri, yakni melalui Alquran dan as-Sunnah.

Kedua, mempertajam nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum, baik ditingkat sekolah atau perguruan tinggi. Kurikulum di tingkat sekolah yang ada saat ini, belum betul-betul mengakomodasi semangat multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan dalam bentuk apa multikulturalisme akan diajarkan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan pada wilayah kurikulum, yakni kurikulum yang mengakomodasi multikulturalisme secara lebih jelas. Materi multikulturalisme bisa saja diwujudkan dalam mata pelajaran tersendiri. Namun konsekuensinya, harus dapat secara rinci diuraikan dalam sebuah buku materi ajar. Kalaupun tidak melalui materi pelajaran tersendiri, paling tidak harus ditegaskan dalam topik pembahasan dalam suatu mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Ketiga, meningkatkan pemahan dan kemampuan para pendidik terhadap materi-materi multikulturalisme. Karena harus diakui, di kalangan pendidik sendiri masih banyak yang belum memahami betul tentang konsep-konsep multikulturalisme. Tidak sedikit di antara para pendidik yang masih berpikiran sem-

pit mengenai dinamika keragaman dan perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada mereka, baik melalui pelatihan, bahan bacaan serta ruang kreatifitas untuk menulis tentang pendidikan multikultural, atau yang lainnya. Upaya ini harus terprogram dan diusahakan bersifat keharusan bagi mereka. Selain dalam proses pendidikan atau pengajaran, guru juga diharuskan untuk membuat program-program yang dapat mengarahkan siswa memahami dengan baik persoalan multikulturalisme. Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama lain, tempat-tempat bersejarah atau lainnya, yang hakikatnya terdapat nilai-nilai multikulturalisme di dalamnya.

Keempat, pengembangan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai moral serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam perlu dilakukan. Secara konkret dapat dilakukan dengan memberdayakan siswa untuk mengadakan penelitian walaupun bersifat sederhana, *field note*, paper, karya tulis dan sejenisnya yang kemudian harus dapat dipublikasikan. Selain itu, bisa juga dengan ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan masyarakat atau acara-acara budaya lokal yang terdapat pada masyarakat tertentu. Khusus untuk kalangan mahasiswa, program penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah *include* dalam kurikulum pendidikan, perlu dibekali nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme secara lebih jelas. Penelusuran tidak hanya terbatas pada budaya yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, termasuk budaya lokal yang masih belum jelas kedudukannya dalam Islam-pun, justru perlu dikaji oleh mahasiswa.

Kelima, penguatan dari sisi kebijakan dan pembiayaan (anggaran), yang dalam hal ini berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang atau para pembuat kebijakan. Perlu alokasi yang jelas untuk mengembangkan pendidikan Islam multikultural.

Bentuk-bentuk pengembangan yang telah diuraikan di atas, tentu saja memerlukan usaha yang keras untuk dapat direalisa-

sikan. Kerjasama di antara masyarakat atau kelompok-kelompok yang konsern dengan pengembangan pendidikan Islam multikultural, kalangan akademis atau pemikir-pemikir muslim, lembaga pendidikan Islam dan pemerintah sangat diperlukan, agar tujuan dari pengembangan pendidikan Islam multikultural dapat tercapai secara maksimal sesuai harapan.

Analisis

Pendidikan Islam multikultural, walaupun merupakan wacana yang relatif baru dalam khazanah pendidikan Islam di Indonesia, namun pada dasarnya jika dikaji dari sisi esensinya telah menjadi ruh atau spirit dari dasar-dasar ajaran Islam yang termuat dalam Alquran maupun as-Sunnah, sebagai referensi pijakan kehidupan umat muslim sejak belasan abad yang lalu. Konsep atau gagasan pendidikan Islam berbasis multikultural yang telah banyak dimunculkan saat ini perlu untuk terus dikembangkan, baik dari aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

Keberadaan pendidikan Islam multikultural yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta dinamika masyarakat modern, sesungguhnya sangat tepat untuk menjawab sekian persoalan yang menyangkut dimensi perbedaan dan keragaman. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin cepat tanpa batasan ruang dan waktu, sangat memerlukan sebuah kesadaran individu yang kemudian berimplikasi pada kesadaran kolektif untuk menerima dan menempatkan segala perbedaan dan keragaman tersebut sebagai bagian yang perlu dihargai dan dihormati.

Upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural memang tidak mudah dilakukan. Tentu banyak tantangan yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses perjalanannya. Di antara tantangan-tantangan yang masih sangat mungkin untuk dihadapi adalah:

1. Aspek sosio-kultural, yakni dari komponen masyarakat tetap

- akan muncul penentangan dari kelompok-kelompok yang cenderung tekstualis (ortodoks), baik dari kelompok muslim maupun non muslim terhadap wacana pendidikan multikultural ataupun pendidikan Islam multikultural. Hal ini pada dasarnya merupakan persoalan klasik, yang terkait dengan adanya perbedaan dalam memahami pesan-pesan wahyu, serta adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu terhadap isu multikulturalisme yang dapat melemahkan keyakinan seseorang dalam menjalankan agama;
2. Aspek politik, yakni dari komponen institusi pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, penyamaan pandangan (visi) dan usaha-usaha dalam menghasilkan kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan (Islam) terhadap pentingnya pendidikan multikultural tidak bisa berjalan dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa berdampak pada kebijakan penerapan pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan;
 3. Aspek pendidikan, yakni dari komponen lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan, mungkin akan terjadi sedikit kebingungan dalam proses pengelolaan pendidikan multikultural. Tawaran konsep dan bentuk pendidikan multikultural yang sangat mungkin untuk berbeda atau beragam dan merupakan hal yang sulit untuk disatukan, bisa jadi akan menghambat para praktisi pendidikan yang ada di lapangan.

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia, yaitu; *Pertama*, pendidikan multikultural yang secara *inheren* sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yakni melalui falsafah bangsa Indonesia *bhinneka tunggal ika*, suku gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya, merupakan modal penting untuk terus mengembangkan wacana pendidikan Islam multikultural menjadi lebih besar.

Kedua, pendidikan Islam multikultural yang sesungguhnya

dapat memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini dan merupakan konsep pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas, keragaman, serta apapun aspeknya dalam masyarakat, maka dalam konteks kajiannya dapat terus diperdalam dan digali dari sumber-sumber ajaran Islam, yakni Alquran dan as-Sunnah. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus mendekatkan umat Islam pada nilai-nilai spiritualitas agamanya. *Ketiga*, perlu kajian lanjutan bagi pengembangan konsep serta bentuk-bentuk pendidikan Islam multikultural, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dapat diimplementasikan di lapangan. Uraian dalam makalah ini, hanyalah bagian kecil dari banyak tawaran yang bisa dilakukan.

Penutup

Dari uraian mengenai pengembangan pendidikan Islam multikultural di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: *Pertama*, Pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Alquran dan as-Sunnah.

Kedua, Pendidikan Islam multikultural pada prinsipnya memiliki landasan yang cukup jelas, baik ditinjau dari landasan preskriptif (ideal) maupun empiris.

Ketiga, Pengembangan pendidikan Islam multikultural, setidaknya memiliki dua makna, yakni kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengembangan pendidikan Islam multikultural dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi bacaan, memperluas sosialisasi, membuat forum-forum, serta memban-

gun kultur yang mengakomodasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam. Adapun secara kualitatif, komponen-komponen yang perlu dikembangkan, di antaranya adalah: penguatan landasan teori dengan penjabaran yang lebih sistematis, mempertajam kurikulum, meningkatkan kompetensi pendidik, pembiayaan, serta menghidupkan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Keempat, Pendidikan Islam multikultural memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang karena memiliki landasan yang jelas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tetap akan selalu ada, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras dalam proses pengembangannya, terutama yang terkait dengan konsep dan pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Amin. *Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religius*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2005.
- Gafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2005
- Gollnick, Donna M. dan Philip C. Chinn. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*, New Jersey: Prentice Hill. 2002
- K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk.. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alquran*, Bandung: CV. Diponegoro. 2001
- Kartono, Kartini & Dali Gulo.. *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya. 1987
- Langgunglung, Hasan.. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1993